

## OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN DAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Titin Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Samsul Bahri Pane<sup>2</sup>, Mardiansyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [samsul.bahri@fisip.uisu.ac.id](mailto:samsul.bahri@fisip.uisu.ac.id)  
[mardiandian948@gmail.com](mailto:mardiandian948@gmail.com)

### Abstract

*Optimization is part of maximizing activities so as to realize the desired or desired profit. That with the optimization efforts can be realized activities and or programs effectively and efficiently. This research is based on the service and performance of the Bandar Rejo Village government in the field of community empowerment in Bandar Rejo Village. This study aims to determine the study of village institutions in carrying out their duties and functions to regulate and manage the interests of the community. The research method used is descriptive method with qualitative analysis, namely data collected from interviews with resource persons to describe the service system and performance in the field of community empowerment, through open interviews with the village head's office as many as 4 (three) people. The results show that leadership in community empowerment has been going quite well, but there are still obstacles given that there are associations of citizens who have opinions and thoughts on their lives so that community participation in empowerment activities is not optimal so that there are several work implementation processes that have not been implemented. optimal.*

**Keywords:** *Pemberdayaan Masyarakat*

### PENDAHULUAN

Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengembangan untuk memajukan suatu desa, namun dalam kenyataannya, masih banyak pemerintah desa yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penggerak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga menyebabkan terjadinya kurangnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Tugas pemerintah desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu harus benar-

benar di laksanakan oleh pemerintah desa guna terselenggaranya pemerintahan yang baik dan efisien demi kemaslahatan masyarakat desa.

Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek saja. Untuk itu kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas dalam memberdayakan masyarakat desa secara maksimal. Namun masalah yang kini terjadi di desa Bandar Rejo adalah tentang kurangnya peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat desa Bandar Rejo kurang mendapatkan sentuhan pemberdayaan dari pemerintah desa khususnya di bidang pertanian. Sehingga berakibat pada sulitnya masyarakat dalam mendapatkan pupuk serta bibit untuk bertani, dan alat untuk bertani pun masih bersifat sederhana. Dari uraian tersebut tergambar bahwa Pelayanan dan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandar Rejo Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun.

## **KAJIAN LITERATUR)**

### **A. Pemerintah Desa**

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di Desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan Desa. Dimana pembangunan Desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mendorong pembangunan ditingkat Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang

dijalankan Desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes).

## **B. Pelayanan dan Kinerja**

### **Pemerintahan Desa**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kantor desa memerlukan perhatian dan keseriusan oleh perangkat desa untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menunjang keberhasilan dan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kinerja perangkat desa atau aparatur desa yang sinergis, aparatur desa dituntut untuk dapat meningkatkan potensi yang ada dalam usaha meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam pelayanan publik, baik secara individu atau kelompok agar bisa dijalankan secara seimbang untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan waktu dan anggaran yang ada.

Keberhasilan kerja pegawai memerlukan perhatian untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan organisasi dan lembaga tertentu. Upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik, setiap pegawai dituntut untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri serta seluruh komponen kerja harus dijalankan dengan seimbang agar

apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran yang ditentukan.

## **C. Pemberdayaan Masyarakat**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.

Desa Bandar Rejo yang memiliki mata pencaharian masyarakat sebagian besarnya adalah petani. Berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian selalu dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit pertanian, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya. Permasalahannya, banyak bantuan yang diberikan tidak terkelola dengan baik, malahan ada bantuan yang menyimpang, misalnya dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian sebagian masyarakat tidak menerima bantuan, tidak diperhatikan. Padahal pentingnya sektor

pertanian sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan mengingat semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk didesa Bandar Rejo yang menjadi sasaran penelitian, maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan penting kiranya membicarakan cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bandar Rejo yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Terhadap Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian yaitu Kekuasaan, Sistem Pendidikan Formal yang maju, Sistem terbuka pada lapisan masyarakat, Adanya orientasi untuk maju ( Masa depan) Adanya Sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat
2. Faktor Penghambat Terhadap Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian yaitu Kelompok kepentingan, Kualitas

Sumber daya manusia pemerintah desa.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang dimana akan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan suatu penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori yang ada. Penelitian ini berlokasi di Desa Bandar Rejo, Kabupaten Simalungun yang terletak di jalan Bandar Rejo Huta VI, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun Kode Pos 20257. Infroman dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive* atau yang dianggap benar-benar memahami realitas yang terjadi, seperti informan kunci, informna umum serta informan pendukung. Serta menggunakan teknik observasi atau kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik Wawancara yang dimana akan bertanya jawab dengan mengajukan pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu teknik Dokumentasi yang dimana aka menjdi salah satu cara dalam mendapatkan data, arsip-arsip atau

dokumen atau hal-hal lain yang berubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif seperti Reduksi Data, Penyajian Data serta Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dalam Rangka Melaksanakan Tugas dan Fungsi Untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat.

Pemberdayaan Kelembagaan Desa merupakan hal penting untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa terhadap kepentingan masyarakat desa. Berhasil tidaknya pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tergantung seberapa berdayanya lembaga desa yang telah ditetapkan. Karena lembaga desa tersebut mencerminkan ketersediaan urusan pemberdayaan masyarakat diseluruh sektor kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan oleh Sutrisno Kepala Desa Bandar Rejo, Senin 21 Maret 2022 :

*“ Untuk mengukur keberhasilan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilihat dari keberhasilan kepala desa dalam hal pemberdayaan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah desa”*

Tidak hanya dilihat dari kepala desa saja, keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dilihat dari kinerja para pegawai kantor kepala desa Bandar Rejo, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Juhairiah Kaur Pemerintahan Desa Bandar Rejo, Senin 21 Maret 2022 :

*“Sebenarnya tidak hanya dilihat dari kepala desa saja, tetapi bisa dilihat dari kinerja kami, karena jika hanya kepala desa saja yang turun tangan dalam hal ini, dan tanpa campur tangan kami itu belum tentu berhasil seperti yang sekarang”*

Tidak hanya itu, keberhasilan itu juga ada karena para pegawai dan kepala desa saling bertukar pikiran, seperti apa yang mereka laksanakan yaitu rapat mingguan mengenai pemberdayaan masyarakat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yunita Azhari selaku Kaur Pembangunan Desa Bandar Rejo, Senin 21 Maret 2022 :

*“Bukan hanya dilihat dari kepala desa saja, keberhasilan ini kami raih ya karena adanya rapat mingguan yang rutin kami laksanakan untuk membahas program pemberdayaan yang akan kami lakukan kepada masyarakat”*

Sejalan dengan keberhasilan kepala desa dalam pemberdayaan kelembagaan tercermin juga dari program pemberdayaan yang dilakukan bidang

lainnya. Sekarang ini, pemberdayaan yang cukup berhasil adalah pemberdayaan dibidang ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa bandar rejo, kalau hanya pembinaan dibidang UMKM saja belum cukup, pemerintah desa masih harus segera menambah pembinaan yang dapat membantu ekonomi masyarakat yang tergolong tidak mampu, seperti yang disampaikan Kaur Pemerintahan Desa Bandar Rejo Ibu Juhairiah, Senin 21 Maret 2022 :

***“Sebenarnya pembinaan yang diberikan pemerintah desa ini hanya berupa pembinaan dibidang UMKM saja, dan saya rasa itu tidak cukup untuk membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, terlebih lagi, jika masyarakatnya diluar dari wilayah UMKM tersebut”***

Kurangnya pembinaan dari pemerintah desa kemasyarakat, pesaing dalam UMKM yang sama dapat juga membuat masyarakat kurang bersemangat, karena banyak nya pesaing dari desa luar, yang mungkin harganya lebih murah daripada UMKM yang ada di desa Bandar Rejo, tidak hanya itu, untuk mencapai program tersebut pemerintah desa bandar rejo juga memiliki lokasi tertentu untuk dapat menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Penempatan lokasi juga harus

strategi, seperti yang disampaikan oleh bapak Sutrisno selaku kepala desa bandar rejo, Senin 21 Maret 2022, Jam 14.00 WIB:

***“Penempatan lokasi sesuai koordinasi dengan kepala desa, untuk UMKM itu ada di Huta VII, Huta I, dan Huta IV. Dan disetiap huta itu berbeda jenis UMKM nya “***

Bukan lokasinya saja yang harus strategis, pemilihan jenis UMKM nya juga harus beragam, tetapi UMKM itu tidak dapat membantu masyarakat karena tidak setiap desa ada UMKM nya, seperti yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Desa Bandar Rejo ibu Juhairiah, Senin 21 Maret 2022 :

***“Seharusnya disetiap desa itu ada UMKM nya, jadi masyarakat setiap desa itu tertolong ekonominya, kalau hanya 3 desa saja itu belum dapat membantu masyarakat, makanya kami sedang memikirkan pembinaan apalagi yang dapat kami terapkan untuk desa yang belum memiliki UMKM ini”***

Dari 3 desa yang memiliki UMKM, ternyata setiap desa memiliki UMKM yang berbeda, tidak hanya fokus 1 UMKM saja, Selain itu, bukan hanya lokasi saja yang menjadi sorotan kepada peminat UMKM yang ada di Desa Bandar Rejo, sebenarnya itu saja belum teralokasikan dengan baik, karena lokasinya masih sulit

untuk dijangkau karena fasilitas jalan dan angkutan umum belum memadai. Bukan hanya akses jalan yang sulit dijangkau, sulitnya masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga menjadi persoalan untuk mengikuti program yang ada, seperti yang disampaikan oleh Kaur Pembangunan Ibu Yunita Azhari, Senin 21 Maret 2022 :

***“Masyarakat yang tergolong tidak mampu dan tidak memiliki kendaraan pribadi juga menjadi persoalan yang ada, sehingga untuk sebagian masyarakat yang kurang mampu mengalami kendala untuk mengikuti program kegiatan masyarakat yang ada.”***

Kurangnya kepedulian pemerintah provinsi terhadap akses jalan dan kurangnya transportasi membuat beberapa masyarakat kesulitan untuk menjual kerajinan mereka keluar dari desa, karena masyarakat yang mempunyai UMKM tersebut tidak semuanya memiliki kendaraan yang memadai. Sementara pekerja yang bergabung didalam UMKM tersebut bermayoritaskan Ibu-Ibu setempat dan juga remaja yang bekum mempunyai pekerjaan. Mereka bergabung guna mengisi waktu kosong.

Tidak hanya pemberdayaan masyarakat dibidang UMKM saja, Pemerintah Desa Bandar Rejo juga menjalankan program dari pemerintah

provinsi, seperti pembagian bibit sawit kepada masyarakat dalam program Peremajaan Kelapa Sawit. Dari program pemerintah provinsi yang baru-baru saja terlaksanakan, jadi belum banyak lahan yang terkena program tersebut, dalam manajemen nya masyarakat Bandar Rejo tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan program ini, hanya saja masyarakat cukup memiliki lahan yang dimana lahan tersebut ditanami sawit, seperti apa yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Ibu Juhairiah, Senin 21 Maret 2022:

***“Masyarakat tidak dipungut biaya, hanya saja masyarakat harus memounyai lahan yang ditanami sawit, dengan dana yang dimodali pemerintah 25jt/hektar dananya, dimulai dari pembersihan lahan, replanting lahan, kalau sawah dia di bersihkan dengan alat berat, pembibitan, penanaman pertama dan pemupukan pertama semua itu di tanggung oleh pemerintah”***

Di karenakan banyaknya lahan masyarakat, jadi program pemerintah provinsi ini dilakukan sebanyak 2 kali, yang dimana tahap pertama sudah sukses terlaksanakan, hanya saja sekarang lagi menunggu tahap yang kedua, Bentuk lain dari pembinaan yang dilakukan pemerintah adalah terkait dengan pembinaan bidang sosial. Pemerintah desa

berperan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak terjerumus terhadap kegiatan yang melanggar hukum,

Setiap pemberdayaan masyarakat pasti ada kendala tersendiri untuk dapat menjalankannya dengan baik, sama seperti pemberdayaan masyarakat dibidang sosial ini, mendapat kendala tersendiri. Pemberdayaan yang menyangkut sosial kemasyarakatan cenderung kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Padahal persoalan sosial kemasyarakatan khususnya terkait dengan peredaran narkoba perlu pemberdayaan masyarakat secara intensif. Hal mana disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Juhairiah, Senin 21 Maret 2022 :

***“Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial sedikit terkendala, masyarakat terkesan tidak peduli terhadap perubahan sosial yang dapat beresiko kepada masyarakat seperti peredaran narkoba. Kita telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun terkesan acuh tak acuh seperti tidak peduli,”***

Dan dari semua program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bandar Rejo, diperlukan koordinasi guna untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap program yang ada. Dalam melakukan aktivitas, pemerintah selalu

mebutuhkan adanya sumber daya manusia maka tidak ada proses kerja sama yang dilakukan oleh atasan dan pegawai, Sesudah di koordinasikan dan disepakati oleh pemerintah kecamatan, selanjutnya pemerintah desa menyapaikan hasilnya dengan cara bergabung dengan kumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti apa yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Ibu Juhairiah, Senin 21 Maret 2022 :

***“ Kami koordinasikan dulu, kalau sudah disepakati kami juga berinisiatif untuk ikut bergabung dengan masyarakat seperti ngobrol di warung kopi dan juga di acara perwiritan ibu-ibu untuk mensosialisasikan kegiatan desa agar mereka lebih berpartisipasi”.***

Untuk urutan koordinasi yang dijalankan, guna melancarkan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Bandar Rejo, pemerintah desa hanya perlu membicarakan dan mendiskusikan kepada Camat.

Sementara itu menurut observasi peneliti bahwa pemberdayaan kelembagaan di desa Bandar Rejo belum berjalan secara maksimal. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten terkesan tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sering kali masyarakat tidak mengetahui informasi program pemberdayaan masyarakat yang ada dilingkungan. Hanya orang-orang tertentu saja yang cepat mendapatkan informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa, maka dari itu hanya

sedikit masyarakat yang berpartisipasi. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat sebenarnya sederhana saja, hanya mengajak beberapa masyarakat yang berperan aktif di Huta masing-masing, maka dengan cara itu pula masyarakat lainnya akan cepat mendapatkan informasi tersebut

## KESIMPULAN

Berdasarkan jawaban hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan :

- a. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah cukup baik karena masyarakat yang terlibat cukup mempunyai keterampilan di bidang UMKM, walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalan lancarnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan karena kurangnya bantuan pemerintahan desa untuk dana dan lokasi, untuk menghasilkan produk yang bervariasi bagi UMKM. Desa Bandar Rejo tentunya sudah memiliki atau menetapkan beberapa titik kampung yang menjadi objek untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat ini. Lokasi yang dituju meliputi Huta VII, Huta I, Huta IV, yang berpotensi atau unggul dibidang UMKM.
- b. koordinasi kepemimpinan kepala desa alam pemberdayaan masyarakat sudah

berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya diskusi atau musyawarah dengan Camat terlebih dahulu dalam menentukan arah pemberdayaan masyarakat seperti apa yang akan dijalankan dan juga dengan adanya rapat desa maka, kepala desa juga mengajak masyarakat untuk mengeluarkan ide dalam upaya membangun desa dan masyarakat yang lebih baik.

- c. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial dan kesehatan baik itu program posyandu balita, ibu hamil, dan lansia, pengobatan atau pengecekan penyakit gratis, serta sosialisai narkoba dan juga kenakalan remaja diadakan di lapangan pemukiman warga agar dapat menjangkau masyarakat yang kurang dari segi ekonomi dan rentan terhadap penyakit.

## REFERENSI

- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Beni Ahmad Saebani. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* , Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

- Hani Handoko, 2017, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S,P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi cetakan ketiga belas)* . Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Himawan S. Pambudi. 2003. *politik pemberdayaan : jalan mewujudkan otonomi desa* , Yogyakarta : Lapera Pustaka.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sarundajang, S.H. 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Daerah*, Jakarta : Pustaka sinar Harapan,.
- Sutrisno, (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suwanto. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan*. Bandung : Bisnis Alfabeta.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Winardi, 1999. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung : Tarsito.